



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 851/II/2015

IV/FEBRUARI 2015



DPR Sahkan APBN-P 2015

DPR Sahkan APBN-P 2015



Ketua DPR RI Setya Novanto berjabat tangan dengan Ketua Banggar DPR

Sidang Paripurna DPR RI pada Jumat, (13/02/15) akhirnya menyepakati dan mengesahkan Rancangan Undang-undang APBN-Perubahan 2015 disahkan menjadi APBN-P 2015. Hasil ini didapat setelah skorsing rapat yang cukup panjang dan lobi yang ketat.

“Setelah melalui serangkaian rapat yang intensif dan forum lobi yang telah kita lalui tadi, sehingga, asumsi makro yang telah dibahas sebelumnya dapat disahkan. Sah?” tanya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat memimpin sidang di Gedung Nusantara II.

Jawaban “Sah!” pun didengungkan oleh seluruh Anggota Dewan yang hadir. Palu pengesahan pun langsung diketok oleh Taufik.

Sebelumnya, Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit melaporkan hasil pembahasan RAPBN-P 2015 di Badan Anggaran. Ia melaporkan, berbagai kesepakatan pada asumsi dasar APBN 2015, yaitu pertumbuhan ekonomi disepakati di angka 5,7 persen, inflasi sebesar 5,0 persen, dan nilai tukar Rp 12.500 per 1 USD.

“Kemudian, tingkat suku bunga SPN 3 bulan disepakati 6,2 persen, dan harga minyak mentah 60,0 USD/barel. *Lifting* minyak bumi 825 ribu barel/hari, *lifting* gas bumi 1.221 ribu barel setara minyak perhari, sehingga *lifting* minyak dan gas bumi disepakati 2.046 ribu barel per hari,” jelas Politisi F-PG ini.

Dengan begitu, tambah Politisi asal Dapil Kalimantan Selatan I ini, dengan asumsi dasar tersebut, disepakati pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P TA 2015

sebesar Rp 1.761 triliun, yang terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp 1.758 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 3,3 triliun. Penerimaan dalam negeri berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.489 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 269 miliar.

Sementara, belanja negara disepakati sebesar Rp 1.984 triliun, yang terdiri dari Rp 1.319,5 triliun untuk belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah disepakati sebesar Rp 643,8 miliar dan dana desa Rp 20,7 miliar.

Dari hasil pembahasan, terdapat perubahan baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja. Dari sisi pendapatan menurun sebesar Rp 7,3 triliun, dan penghematan belanja negara sebesar Rp 29,6 triliun dan pembiayaan Rp 7,2 triliun. Sehingga didapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 20,9 triliun, yang dialokasikan untuk tambahan belanja negara sebesar Rp 20,9 triliun, mengurangi penerbitan SBN sebesar Rp 9 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp 440 miliar.

“Dengan demikian, besaran defisit disepakati sebesar Rp 222,5 triliun, atau 1,9 persen dari PDB. Besaran defisit ini lebih rendah dari APBN 2015 sebesar 2,21 persen dari PDB. Adapun pembiayaan untuk menutup defisit, diambil dari pembiayaan utang sebesar Rp 279 triliun dan pembiayaan non utang sebesar negatif 56 triliun,” imbuh Ahmadi.

Dalam laporannya, Ahmadi juga membacakan pendapat akhir mini fraksi yang disampaikan pada pembahasan di Banggar. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN merupakan terbesar dalam sejarah pelaksanaan APBN di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah diminta untuk memperhatikan dengan serius mengenai pembiayaan proyek-proyek BUMN agar tidak terjadi penyimpangan.

“Fraksi Partai Golkar mendesak Pemerintah untuk membuat terobosan kebijakan di tengah melemahnya harga dan turunnya *lifting* migas. Blok Cepu diharapkan dapat berproduksi secara optimal,” kata Ahmadi.

Sementara, Fraksi Partai Gerindra menolak penghapusan subsidi BBM untuk premium dan pemberlakuan subsidi tetap untuk BBM jenis solar yang mendorong pasarisasi BBM. Dikuatkan oleh Fraksi PKS, yang dengan tegas menolak penghapusan subsidi BBM untuk premium yang direncanakan oleh Pemerintah.

Kemudian tambah Ahmadi, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara,



maupun untuk meningkatkan kualitas belanja negara dalam rangka memelihara pertumbuhan ekonomi dan menjaga kesinambungan fiskal.

Fraksi PAN meminta agar subsidi yang diberikan bisa lebih produktif dan berimplikasi langsung pada penyehatan ekonomi nasional, sehingga Pemerintah diminta memberikan subsidi pada pemenuhan kebutuhan langsung masyarakat di desa dalam bentuk pembangunan infrastruktur.

“Fraksi PKB berpendapat agar Pemerintah dalam pembiayaan melalui penerbitan SBN memperhatikan volatilitas perkembangan pasar SBN dalam negeri. Fraksi PPP meminta, dan berharap kepada pemerintah dan otoritas moneter agar bisa mengelola inflasi dengan baik, sehingga BI Rate yang saat ini sudah 7,75 persen dapat diturunkan oleh otoritas moneter, dengan bauran kebijakan bersama Pemerin-

tah dan Otoritas Jasa Keuangan,” jelas Ahmadi.

Fraksi Partai Nasdem berpendapat, dengan postur alokasi belanja negara saat ini, dinilai bahwa Pemerintahan baru ini selayaknya menjadi momentum untuk melakukan sejumlah langkah efisiensi, kemudian dialihkan pada porsi belanja yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dan yang terakhir, Fraksi Partai Hanura berpendapat, pentingnya Pemerintah untuk memperhatikan kualitas pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan terhadap penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, menurunnya ketimpangan pendapatan bukan hanya sebatas pada besaran angka pertumbuhan saja. (sf)/foto: denus/parle/iw.

Indonesia Tidak Bisa Hambat Masuknya Budaya Asing



Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon foto bersama Dubees India

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan di era globalisasi, Indonesia tidak bisa menghambat masuknya budaya asing, termasuk budaya yang berasal dari India. Hal itu malah menjadi sebuah tantangan bagi seniman atau para pekerja seni Indonesia untuk terus meningkatkan karya-karyanya, sekaligus mempertahankan budaya asli Indonesia.

“Di era globalisasi ini kita tidak bisa menghambat masuknya budaya asing, termasuk India. Namun sebenarnya budaya India dan Cina sudah sejak lama saling mempengaruhi di Indonesia. India sendiri menjadi salah satu negara yang sejak

awal mendukung kemerdekaan Indonesia.

Bahkan ketika Belanda kembali menduduki Indonesia, Indonesia membuat *all Indonesian congress* yang mendesak Belanda untuk segera meninggalkan Indonesia. Jadi jika saat ini banyak masuk budaya India ke Indonesia, hal itu menjadi suatu yang wajar,” papar Fadli Zon usai menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, Gurjit Singh dan Miss India yang ada di Indonesia, Grace Walia, Selasa (17/2) di ruang tamu Pimpinan DPR RI, Senayan Jakarta.

Hampir setiap hari televisi Indonesia menayangkan berbagai sinetron India, tak berlebihan jika kemudian ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat akan keterancamannya karya asli anak bangsa, Fadli menganggap hal itu sejatinya sebagai sebuah tantangan bagi seniman atau pekerja seni Indonesia sendiri untuk lebih meningkatkan kreatifitasnya, mencari sesuatu yang belum ada, serta memperbaiki karya-karyanya untuk lebih baik lagi.

“Ini menjadi sebuah tantangan bagi seniman serta masyarakat Indonesia untuk lebih meningkatkan kreatifitasnya, sekaligus mempertahankan budaya asli bangsa kita. Saya yakin dengan kreatifitas dan daya seni yang tinggi, maka hasil karya anak Indonesia akan terus diminati dan menjadi tuan di negeri sendiri. Jadi selagi kita ada kemauan untuk terus mempertahankan bahkan mengembangkan budaya asli Indonesia, maka kita tidak akan khawatir akan masuknya budaya asing,” tegasnya. (Ayu)/foto:denus/parle/iw.

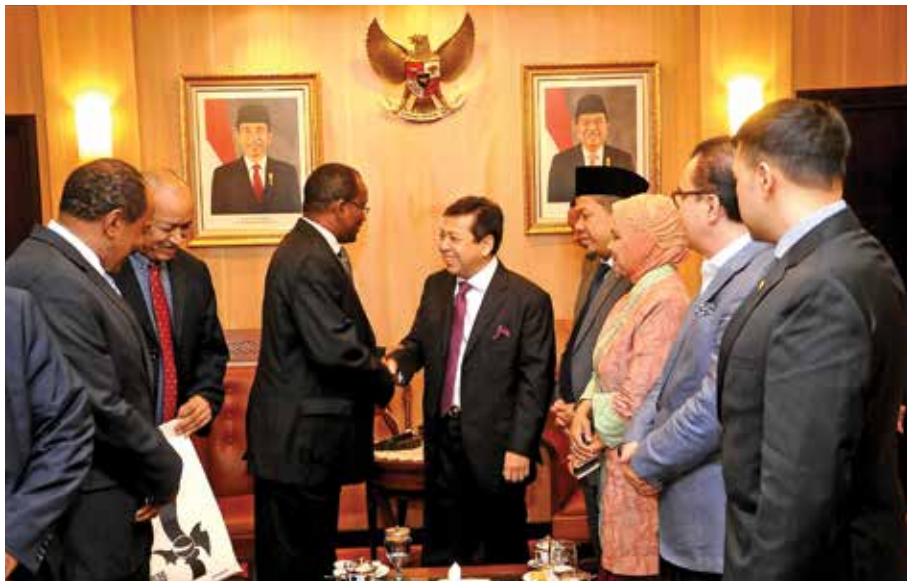
Sudan Ingin Indonesia Jadi Peninjau Pemilu

Ketua DPR RI, Setya Novanto menyambut baik keinginan Menteri Luar Negeri Sudan, Obeidallah Mohammed Obeidallah untuk menjadi *trainer* atau pelatih di bidang perikanan, serta *observer* atau peninjau dalam Pemilu

mendatang di Sudan. Hal tersebut diungkapkannya usai menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Sudan, Selasa (17/2) di ruang tamu Pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Saya sangat mengapresiasi kunjung-

an Menteri Luar Negeri Sudan, karena tidak hanya sekedar untuk berkenalan saja, tetapi juga memiliki arti penting bagi upaya peningkatan hubungan bilateral Indonesia-Sudan,” ungkap Novanto.



Ketua DPR RI Setya Novanto berjabat tangan dengan Menlu Sudan

Ditambahkannya, terkait dengan permintaan Sudan untuk mengirimkan pelatihan atau *training* khusus tentang Perikanan dan Pertanian, Novanto sangat menyambut baik keinginan tersebut. Hal tersebut menjadi sebuah bentuk kepercayaan bangsa lain atau

dunia internasional akan kemampuan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Lebih lanjut ia mengatakan, akan menyampaikan keinginan tersebut kepada pemerintah dan komisi-komisi terkait yang ada di DPR RI.

Menurut Novanto dalam sambutan-

nya, sejatinya hubungan kerjasama Indonesia dan Sudan sudah berjalan cukup baik, bahkan sudah terjalin sejak Indonesia belum merdeka. Dimana seorang ulama Sudan, Syekh Ahmed Surkati datang ke Indonesia dan kemudian mendirikan yayasan Al Irsyad yang hingga kini masih eksis di dunia pendidikan dan dakwah Islam.

Tidak hanya itu, Menteri Luar Negeri Sudan juga berharap peningkatan hubungan bilateral kedua negara juga bisa diwujudkan dengan kesediaan Indonesia untuk menjadi *observer* atau peninjau dalam pemilihan umum yang akan digelar Sudan dalam waktu tidak lama lagi.

“Kami sangat menyambut baik keinginan Sudan untuk menjadikan Indonesia sebagai *observer* atau peninjau dalam pemilu di Sudan mendatang. Mengingat proses demokrasi yang terjadi di Indonesia selama ini berjalan dengan sangat baik, damai dan lancar. Sehingga Sudan ingin mencontoh hal tersebut,” jelas Politisi dari Dapil NTT II ini. (Ayu)/foto:denus/parle/iw.

DPR Harapkan Qatar Perlebar Akses Pekerja Profesional

Pimpinan DPR berharap Qatar dapat memperlebar akses pekerja profesional dari Indonesia untuk bekerja di Qatar. Apresiasi pun diberikan kepada Qatar karena telah menyerap pekerja Indonesia yang memiliki keterampilan dan profesionalitas.

Demikian salah satu poin perbincangan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan Duta Besar Qatar untuk Indonesia Mohaamed Khater-Al Khater. Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah. Selain itu, hadir pula Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf dan Anggota Komisi I Charles Honoris.

“Qatar menjadi salah satu negara tujuan para pekerja profesional Indonesia. Catatan kita, cukup banyak warga Indonesia yang bekerja di bidang profesional,” kata Fahri Hamzah, di ruang kerja Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Senin (16/02).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Agus Hermanto. Ia memberikan apresiasinya karena Qatar telah banyak menyerap pekerja profesional Indonesia. Ia berharap Qatar dapat memperlebar akses pekerja Indonesia bekerja di Qatar.

“Sangat bagus tenaga kerja kita di Qatar itu lebih banyak tenaga kerja yang terampil dan profesional Sehingga ini patut kita hargai dan apresiasi,” imbuhs Agus.

Dubes Qatar pun membenarkan hal ini. Ia menyatakan, setidaknya ada 40 ribu Warga Negara Indonesia bekerja di



Pimpinan DPR RI menyerahkan cinderamata kepada Dubes Qatar

Qatar. Sebagian besar bekerja di bidang perminyakan dan gas. Bahkan, kebanyakan membawa keluarganya ke sana.

Selain masalah itu, Indosat juga menjadi bahan diskusi dalam pertemuan ini. Pasalnya, sebagian besar saham Indosat kini dikuasai oleh Qatar. Ia mengharapkan keberpihakan Qatar kepada Indonesia mengenai Indosat.

“Indosat merupakan kebanggaan Indonesia. Indosat memiliki teknologi yang bagus. Tapi sekarang saham terbesar Indosat dimiliki Qatar. Kami mohon kerjasama ini dapat

ditingkatkan,” harap Agus.

Untuk membicarakan masalah Indosat, Dubes Qatar menawarkan untuk berdiskusi secara khusus dan terkon-sentrasi. Ia menyatakan, ada kesalahpahaman terhadap hal ini, sehingga perlu ditindaklanjuti.

Masih dalam kesempatan yang sama, Fadli menyatakan kedua negara tergabung dalam Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB). Ia berharap, GKSB ini dapat menjadi jembatan hubungan antara kedua parlemen. (sf)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Dubes Belarusia Harap Indonesia Dirikan Kedubes Di Negeranya

Duta Besar Republik Belarusia, Vladimir Lopato-Zagorsky berharap Indonesia mendirikan kantor perwakilan atau kedutaan besar di Belarusia. Hal tersebut diungkapkannya dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR RI, Senin (16/2).

“Ada beberapa keinginan yang disampaikan Dubes Belarusia kepada Pimpinan DPR, salah satunya dengan pembukaan kantor perwakilan atau Kedutaan Besar Indonesia di Belarus,” ungkap Wakil Ketua DPR, Agus Hermato usai menerima Dubes Belarusia di ruang kerja Pimpinan DPR, Senayan Jakarta (16/2).

Dikatakan Agus, pihaknya menyambut baik keinginan Dubes Belarusia tersebut, pasalnya hubungan bilateral kedua negara sudah berlangsung cukup lama. Dari hubungan tersebut telah menghasilkan kerjasama diantaranya di bidang pengadaan alutsista dengan PT Pindad, serta kerjasama di bidang industri lainnya. Bahkan konon kerjasama di bidang perdagangan tersebut mampu menghasilkan neraca perdagangan yang cukup signifikan.

“Hubungan kedua negara telah terjalin sejak lama, dan telah menghasilkan beberapa kerjasama, selain itu juga di Indonesia sendiri sudah ada Kantor Kedutaan besar Belarus di Indonesia. Jadi alangkah baiknya kalau Indonesia juga mendirikan kantor kedutaan besar disana (Belarus-red).



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Dengan demikian kerjasama kedua negara akan semakin banyak dan kompleks,” jelas Agus.

Pada kesempatan itu, melalui DPR RI Vladimir juga berharap agar pemerintah Indonesia memberikan *on arrival visa* bagi warganya. Hal itu akan memudahkan masyarakat Belarusia yang ingin datang ke Indonesia. Selama ini dikatakan Vladimir pihaknya sudah mengeluarkan *on arrival visa* bagi WNI (Warga Negara Indonesia) yang ingin berkunjung ke Belarusia.

“Dengan adanya *on Arrival Visa* yang telah dikeluarkan republik Belarus memudahkan WNI yang ingin berkunjung ke negara tersebut. Begitupun sebaliknya, pemerintah Indonesia diharapkan juga bisa mengeluarkan *on arrival visa* yang akhirnya akan membantu meningkatkan industri pariwisata,” pungkas Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Terkait keinginan yang disampaikan Vladimir kepada DPR RI tersebut, Agus mengaku akan membicarakannya dengan pemerintah melalui Kementerian Luar negeri, serta Komisi I sebagai komisi yang menangani bidang kerjasama luar negeri. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan di BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) akan dibentuk GKSB (Grup Kerjama Bilateral) antara DPR RI dengan Belarusia. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw.

POLITIK INDONESIA MENARIK PERHATIAN JERMAN

Perkembangan politik di Indonesia ternyata menarik perhatian masyarakat Jerman. Sistem multipartai, keberadaan parlemen, dan bentuk negara di Indonesia, menjadi topik perbincangan hangat antara Ketua DPR RI dengan Ketua Yayasan Hanns-Seidel, Jerman.

Ketua Yayasan Hanns-Seidel Foundation, Ursula Mannle, tertarik mempertanyakan komposisi fraksi di DPR yang berjumlah sepuluh fraksi. Sementara di Jerman hanya ada partai pemerintah dan partai oposisi. Demikian salah satu perbincangan antara Ketua DPR RI Setya Novanto dengan Delegasi Hanns-Seidel di DPR, Senin (16/2). Hanns-Seidel sendiri merupakan yayasan politik milik partai yang kini sedang berkuasa di Jerman.

Hampir semua partai memiliki yayasan sendiri. Anggaran semua yayasan politik itu didapat dari parlemen. Kegiatan yayasan ini lebih banyak di dunia politik. Ia mendanai pendidikan politik bagi kaum muda Jerman yang ingin terjun ke dunia politik. Yayasan ini sudah membangun perwakilan



Ketua DPR RI Setya Novanto menerima Ketua Yayasan Hanns-Seidel Foundation

di Indonesia sejak 1993. Namun, delegasi yang ada saat ini baru kali pertama berkunjung ke Indonesia.

Tukar menukar informasi dan pengetahuan seputar dunia politik di kedua negara terus diperbincangkan. Di Jerman, partai penguasa sangat menentukan arah kebijakan negara. Dan partai oposisi menjadi pengeritik kebijakan pemerintah. Sementara di Indonesia, kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang ikut mendampingi Novanto, menyatakan, pihaknya memang berada di luar pemerintahan, tapi selalu mendukung program pemerintah sepanjang kebijakan itu betul-betul pro rakyat. Kritik tetap dilakukan untuk mengontrol dan memberi jalan alternatif.

Sementara Novanto menambahkan, dulu DPR dan pemerintah selalu bertentangan. Tapi kini, perbedaan itu tidak setajam dulu, yang selalu menimbulkan instabilitas politik di dalam negeri. Hubungan konstruktif antara Pemerintah dan DPR sekarang ditujukan untuk kemajuan rakyat. Mendengar penjelasan Pimpinan DPR tersebut, Delegasi Hanns-Seidel kagum. Dengan sepuluh fraksi yang ada di DPR, stabilitas politik tetap terjamin di Indonesia. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Indonesia Belajar Teknologi Dari Belarusia



Pimpinan DPR RI berdialog dengan Dubes Republik Belarusia

Indonesia harus meningkatkan kerjasama teknologi dengan Republik Belarusia. Hal tersebut terungkap saat Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kunjungan Duta Besar Republik Belarusia, Vladimir Lopato Zagorsky di ruang kerja Ketua DPR RI, Senin (16/2).

“Sejatinya kerjasama bilateral Indonesia dengan Belarusia sudah terjalin sejak tahun 1993 dan kemudian diperbaharui pada 2012 lewat penandatanganan kerjasama di bidang perindustrian, perdagangan dan pertanian. Dari sana neraca perdagangan kedua negara mengalami peningkatan sangat baik. Oleh karena itu saya berharap agar hubungan bilateral ini dapat terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan,” kata Ketua DPR.

Novanto mengatakan, negara yang terletak di Eropa Timur itu memiliki banyak keunggulan, salah satunya dalam hal teknologi, khususnya metalurgi. Keunggulan Belarusia itulah yang bisa digunakan Indonesia untuk lebih mempelajari tentang teknologi. Teknologi tersebut dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Pertanian misalnya, dengan teknologi terkini yang dimiliki Belarusia dapat digunakan untuk menghasilkan pupuk berkualitas tinggi. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan hasil pertanian.

Meskipun dikatakan Novanto, selama ini Indonesia juga memiliki pupuk dengan kualitas tinggi, seperti pupuk urea, pupuk NPK dan Pupuk Organik. Kerjasama teknologi Indonesia dengan Belarusia juga diwujudkan dalam bidang pertahanan, yakni lewat pengadaan alutsista atau alat utama sistem senjata Indonesia melalui PT Pindad.

Senada dengan Novanto, Vladimir juga mengungkapkan harapannya untuk dapat terus bekerjasama dengan Indonesia. Bahkan ia mengaku tidak segan untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Indonesia. Tidak hanya itu, Dubes Belarusia ini juga menambahkan bahwa negaranya telah memiliki paket beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Indonesia yang ingin belajar tentang teknologi dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya di negaranya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR sangat menyambut baik dan mengapresiasi keinginan pemerintah Republik Belarusia itu. Ia berjanji akan menyampaikan dan mendiskusikan hasil pembicaraan tersebut dengan pemerintah Indonesia, melalui komisi-komisi terkait yang ada di DPR.

(Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Pimpinan DPR Apresiasi Kunjungan Senat Pakistan

DPR sangat mengapresiasi kunjungan Ketua Senat Pakistan ke Indonesia. Kunjungan ini memiliki arti penting bagi upaya peningkatan hubungan kedua negara. Demikian ditegaskan Ketua DPR Setya Novanto saat menerima kunjungan Delegasi Senat Pakistan dipimpin Syed Nayyer Hussain Bokhari bersama empat anggotanya, di Gedung DPR, Senayan, Jumat (13/2).

Ketua DPR yang didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno serta Sekjen DPR

Winantuningtyastiti dan pejabat lainnya menambahkan, khusus mengenai hubungan Indonesia-Pakistan, kita tidak perlu ragukan kedua negara sejak lama terjalin dengan baik.

Hal ini ditunjukkan dengan ditandatanganinya sejumlah perjanjian antara kedua negara, termasuk kerja sama pertahanan yang telah disahkan DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 9 Februari lalu. “Hal tersebut merupakan pencapaian penting dalam kerjasama kedua negara di bidang pertahanan,” katanya.



Ketua DPR Setya Novanto menerima Delegasi Senat Pakistan

Di bidang perdagangan juga tercatat suatu hal yang positif dari tahun 2009 hingga tahun 2013 menunjukkan kenaikan rata-rata 25-36%. Kedua negara, menurut Pimpinan DPR, juga saling memberikan bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana. Selain itu juga memiliki keprihatinan bersama terhadap isu Palestina.

Wakil Ketua Fadli Zon juga menyampaikan hal yang sama bahwa hubungan kedua negara memiliki arti penting menyusul persetujuan DPR meratifikasi perjanjian pertahanan dengan Pakistan awal pekan ini. Selain itu DPR dan Senat Pakistan sepakat untuk menjalin kerja sama untuk membentuk Parlemen Asia yang akan dilakukan pertemuan berikutnya di Kamboja. Pada Agustus mendatang akan diselenggarakan pertemuan bidang ekonomi Asia.

Pimpinan DPR Koordinator Polkam ini mengakui rencana pembentukan Parlemen Asia diakui memang tidak mudah, terutama bagaimana struktur organisasinya, cara pengambilan keputusan, siapa yang mengelola kesekretariatan dan juga kontribusi masing-masing negara.

“Meski demikian, upaya kearah itu ada. Kita sudah mulai ada pembicaraan dan bagaimana kontribusi masing-masing negara termasuk dimana markas besarnya. Belum lama ini sudah bicara dengan parlemen Rusia dan Tiongkok dan responnya pada umumnya positif. Sudah ada 10 negara yang akan ikut mempersiapkan eksekutif komite ke arah pembentukan organisasi parlemen Asia,” tambah Fadli Zon. (mp)/foto:iwan armanias/parle/hr.

DPR Terus Mantapkan Diri Jadi Parlemen Modern

DPR RI kini terus memantapkan diri menjadi parlemen modern. Cita-cita mewujudkan parlemen modern merupakan kebutuhan kekinian. Dengan berbasiskan prinsip transparansi, teknologi informasi, dan representasi rakyat, DPR bisa disejajarkan dengan parlemen modern lainnya di dunia.

Ketua DPR RI Setya Novanto dalam pidato Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang II tahun 2014-2015, Rabu (18/2), mengatakan, untuk meningkatkan kinerja, pada masa sidang II ini, DPR telah membentuk dua tim reformasi parlemen. Pertama, Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan DPR RI. Kedua, Tim Implementasi Reformasi DPR RI.

Bahkan, DPR telah membentuk dua tim pengawas, yaitu Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan TKI dan Tim Pemantauan DPR RI terhadap Pelaksanaan UU terkait Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua tim terakhir ini merupakan implementasi dari fungsi pengawasan DPR.

“Dalam upaya meningkatkan transparansi dan tersosialisasikannya kegiatan DPR ke masyarakat, DPR terus memperbaiki sistem komunikasi melalui peningkatan penggunaan



Suasana Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang II tahun 2014-2015

teknologi informasi. Di samping itu, untuk memperluas penyebaran informasi atas kegiatan DPR ini, Pimpinan DPR telah melakukan komunikasi dengan berbagai media untuk menyamakan persepsi terkait informasi yang penting diketahui masyarakat,” kata Novanto dalam pidatonya.

Pidato Novanto tersebut sekaligus

menutup masa sidang dan DPR memasuki masa reses mulai 19 Februari hingga 22 Maret 2015. “Masa Reses merupakan bagian dari Masa Persidangan, dimana Anggota DPR melakukan penyerapan aspirasi dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional DPR,” jelas Novanto lagi. (mh) foto: andri/parle/hr

Badan Ekonomi Kreatif Disahkan Menjadi Mitra Kerja Komisi X

Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan Badan Ekonomi Kreatif menjadi Mitra Kerja Komisi X DPR. Penetapan ini disetujui oleh seluruh Ang-

gota Dewan yang hadir, dan langsung disambut ketukan palu dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon, selaku Pimpinan Sidang, di Gedung Nusantara II, Selasa (17/02/15).

Menanggapi penetapan ini, Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya mengucapkan terima kasih dan apresiasinya. Namun, ia memberi catatan kepada Pemerintah terkait pembentukan Badan Ekonomi Kreatif ini.

“Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Presiden. Pasca dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 6, terkait pembentukan dan pelepasan Badan Ekonomi Kreatif dari

Kementerian Pariwisata, kami melihat Pemerintah tidak siap dalam melahirkan badan,” kritik Politisi F-Demokrat ini.



Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya

Apalagi, tambah Riefky, sampai sekarang anggaran Badan Ekonomi Kreatif tidak dapat dibahas oleh DPR. Hal ini diakibatkan pada saat pembahasan APBN-P 2015 beberapa waktu lalu di Komisi X, struktur organisasi Badan Ekonomi Kreatif hanya dua orang. Ia khawatir, hal ini akan berdampak terhadap pembinaan terhadap jutaan seniman dan budayawan.

“Bagaimana kita memberikan anggaran Rp 1,5 triliun terhadap sebuah lembaga yang baru diisi dua orang (pejabat) dan belum ada struktur organisasi dan tata kelolanya. Jadi kami meminta agar Pimpinan DPR dapat

mengkonsultasikan hal ini (kepada Pemerintah),” imbuh Politisi asal Dapil Aceh ini.

Sebagai informasi, Badan Ekonomi Kreatif dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI No 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, yang diundangkan pada 20 Januari 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM. Triawan Munaf ditetapkan sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

Beberapa waktu yang lalu, Badan Ekonomi Kreatif mengusulkan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun dalam APBN-P 2015 kepada DPR. Anggaran ini terdiri dari dua program, yaitu program pengembangan ekonomi kreatif sebesar Rp 1,395,3 triliun. Dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya Badan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 104,7 miliar. Komisi X belum dapat mengabulkan usulan tersebut, karena tidak ada rekomendasi dari Badan Anggaran DPR. (sf,hi,ds)/foto:iwan armanias/parle/iv.

DPR Setujui Revisi UU Pilkada dan RUU Pemda



Suasana Rapat Paripurna DPR menyetujui revisi UU Pilkada dan UU Pemda menjadi UU

Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/2) menyetujui revisi UU Pilkada dan UU Pemda menjadi UU.

“Kami ingin menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah

RUU tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pilkada, dan RUU tentang Perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda,

dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya pimpinan Rapat Paripurna Wakil Ketua DPR Fadli Zon

“Setuju...,” jawab anggota dewan, dan palu diketuk.

Sebelumnya, dalam laporannya dihadapan sidang Rapat Paripurna, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menjelaskan, terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pilkada, dalam pembicaraan Tk I di Komisi II dicapai beberapa hal, diantaranya, terkait pemilihan secara berpasangan, Komisi II dan DPR berhasil memutuskan bahwa pengajuan dilakukan secara berpasangan.

“Yaitu seorang calon gubernur, bupati dan walikota, serta seorang wakil gubernur, bupati dan walikota secara

paket dalam pemilihan secara langsung oleh rakyat,” terangnya.

Selanjutnya, uji publik atau sosialisasi, Komisi II dan Pemerintah menyetujui bahwa proses ini dihapus dengan alasan proses tersebut menjadi domain atau kewajiban parpol atau gabungan parpol yang mengusung pasangan calon, termasuk calon perseorangan yang juga harus melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat.

“Hal ini mengingatkan bahwa Parpol atau gabungan parpol adalah institusi yang memiliki fungsi melakukan seleksi atau rekrutmen calon pemimpin untuk ditawarkan kepada masyarakat, sehingga harus menjadi perhatian bagi Parpol untuk senantiasa melakukan proses tersebut secara akuntabel dan demokratis,” ujarnya.

Penyelenggara pemilu tambah Rambe, disepakati juga tetap diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu, dan mengenai persyaratan disepakati dua hal yaitu usia dan pendidikan pasangan calon, dimana minimal 30 tahun untuk calon gubernur atau wakil gubernur, dan minimal 25 tahun untuk calon bupati dan wakil serta walikota beserta wakilnya.

Terkait ambang batas, jelas Rambe, perolehan kemenangan pasangan calon ditentukan berdasarkan perole-

han suara terbanyak. “Salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah efisiensi baik dari sisi waktu maupun anggaran,” terang Rambe yang juga politisi dari partai Golkar.

Dalam laporan juga dijelaskan, mengenai kesepakatan bahwa akan dilaksanakan pilkada serentak dalam beberapa tahap yang dimulai Desember 2015, serta pelaksanaan pemilihan serentak nasional tahun 2027.

Perubahan UU Pemda

Adapun mengenai substansi RUU perubahan atas UU No.2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih sebagai implikasi dari hasil pembahasan RUU tentang perubahan Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

“Penyesuaian pertama diawali dengan perubahan judul yang diubah menjadi RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, alasannya karena materi yang diubah dalam Perppu No.2 Tahun 2014 yang ditetapkan menjadi UU No.2 Tahun 2015 hanya terkait dengan satu pasal tentang kewenangan DPRD dalam memilih kepala daerah yang dihapus,” jelas Rambe.

la menambahkan, diantara beberapa materi yang harus menyesuaikan dengan hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun

2015 adalah terkait dengan peran wakil kepala daerah akibat diputuskannya bahwa pilkada diikuti oleh pasangan calon yang terdiri atas kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Dengan demikian ada beberapa pasal yang menyesuaikan dengan hasil tersebut,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, RUU ini mencoba merumuskan agar hubungan antara kepala daerah dan wakilnya berjalan harmonis hingga akhir masa jabatan, sehingga diatur adanya kewajiban bagi wakil kepala daerah menandatangani fakta integritas serta melakukan tugasnya bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.

Ditempat yang sama, Mendagri Tjahjo Kumolo dihadapan sidang paripurna memaparkan tentang cepatnya proses revisi atas dua UU ini. “Ini memang sudah menjadi kesepakatan DPR, DPD dan pemerintah sejak awal,” terangnya.

Disini Tjahjo berharap agar UU Pilkada langsung ini tidak diubah-ubah lagi, “Komitmen Perppu adalah pilkada serentak yang dimulai pada tahun 2015, tahun 2019 agenda Pileg dan Pilpres serentak, untuk itu yang disepakati bersama semoga tidak diubah lagi oleh anggota DPR yang akan dipilih tahun 2019,” harapnya. (nt)/foto: naefurodji/parle/hr

Pemerintah Kebiri Wewenang Komisi VIII

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Dauly melayangkan nota protes komisinya di dalam sidang Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II Senayan Jakarta, Jumat (13/2).

“Kami melayangkan nota protes karena telah terjadi perubahan alokasi RAPBN-P (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan) Kementerian Sosial RI tanpa sepengetahuan Komisi delapan sebagai mitra kerjanya,” ungkap saleh.

Dalam nota protes yang dibacakannya tersebut, dijelaskan bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-876/MK.02/2014 tanggal 24 desember 2014 tentang rincian alokasi tambahan pendanaan RAPBN-P 2015 untuk Kementerian Sosial adalah sebesar 15,841 Triliun. Sedangkan APBN

Kemensos 2014 sebesar 8,079 Triliun. Sehingga total APBN 2015 sebesar 23,920 Triliun.

Sementara itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan eselon I Kementerian sosial tanggal 12 Februari 2015 dijelaskan bahwa RAPBN-P Kemensos RI Tahun 2015 sebesar 14,342 Triliun. Ditambah dengan APBN Kemensos 2014 sebesar 8,079 Triliun, jadi sebesar 22,421 Triliun.

Pengurangan alokasi anggaran lebih dari satu triliun itu dikatakan Saleh telah melangkahi dan mengebiri tugas serta wewenang Komisi VIII DPR RI. Sikap pemerintah yang demikian sekedang menunjukkan sikap inkonsistensi dalam mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi dalam percepatan menangani kemiskinan sebagaimana



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Dauly

yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Oleh karena itu dikatakan Politisi dari Dapil Sumatera Utara II ini

pihaknya mendesak pemerintah untuk mengklarifikasi dan menjelaskan serta meminta agar RAPBN-P Kementerian

Sosial Tahun 2015 sesuai dengan Posisi RAPBN-P Kemensos yang tercantum dalam Surat Menteri Keuangan No.s

876/MK.02/2014 tanggal 24 Desember 2014. (Ayu)/foto:andri/parle/iw.

DPR Perjuangkan Aspirasi Negara Berkembang di Forum PCWTO



Wakil Ketua BKSAP DPR Teguh Juwarno

Indonesia mendesak agar fleksibilitas ruang dalam menentukan kebijakan nasional tetap ada, tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang disepakati di WTO (*World Trade Organization*). Hal tersebut diungkapkan Teguh Juwarno, Wakil Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) yang sekaligus sebagai anggota *Steering Committee (SC)* dari *Annual 2015 Session of the Parliamentary Conference on the WTO (PCWTO)*, Senin (16/2) di Geneva, Switzerland.

Teguh menegaskan bahwa rezim perdagangan internasional harus memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia secara luas. Fleksibilitas dalam menerapkan kebijakan nasional itu dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara kepentingan nasional dan internasional. Hal itu sejatinya sangat

diperlukan bagi Negara berkembang, dan negara paling terbelakang (*Least Developed Countries*).

Ditambahkannya, *point* itu pada awalnya mendapat pertentangan keras dari Parlemen Jepang, mengingat dalam semangat dan kacamata WTO tidak mengenal adanya fleksibilitas tersebut. Namun, pandangan Indonesia itu mendapatkan dukungan dari parlemen negara berkembang lainnya seperti India, Tiongkok, Afrika Selatan maupun Yordania.

“Sikap ini memang perlu disampaikan agar negara berkembang tidak selalu didikte oleh kepentingan negara maju,” tegas Teguh.

Di hari kedua pertemuan tersebut juga ditegaskan kembali pandangan Indonesia akan isu pentingnya ketahanan pangan (*food security*) bagi negara berkembang, dan dukungan WTO untuk upaya mengatasi kelaparan. Hal tersebut diungkapkan Delegasi DPR RI dalam debat interaktif yang mengambil tema *Trade as an enabler of peace and better living conditions*, Selasa (17/2).

“Sebagai negara agrikultur, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani adalah tujuan utama. Hampir 60 persen masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Disini diperlukan solusi permanen terhadap ketahanan pangan (*public stockholding for food security purposes*) agar para petani mendapatkan manfaat dari kebijakan perdagangan itu,” urai Teguh dalam

forum PCWTO.

Dalam pembahasan draf hasil PCWTO Indonesia juga mendukung usulan India yang menolak aksi unilateral terhadap impor barang-barang dan jasa, dengan alasan perlindungan lingkungan. Draf dokumen hasil PCWTO tersebut juga mengapresiasi agenda *Ministerial Meeting WTO* di Bali 2013 lalu yang sukses memberikan sejumlah hasil positif, sekaligus menekankan pentingnya agenda-agenda negosiasi untuk merumuskan *Post-Bali Work Programme*.

Pada kesempatan yang sama, Andi Achmad Dara, anggota Delegasi DPR RI, menekankan pentingnya komitmen pemerintah secara serius dalam melakukan perbaikan-perbaikan bagi peningkatan daya saing petani atau produsen dalam negeri.

“Kita berjuang di forum ini agar mendapatkan ruang fleksibilitas dalam melindungi kepentingan nasional, namun pemerintah harus serius dan fokus mempersiapkan produk unggulan yg mampu memiliki daya saing di pasar Internasional,” ujar Dara.

Sementara itu Sartono, anggota Delegasi Indonesia juga mengkritisi kampanye negara-negara maju yang memanfaatkan isu lingkungan untuk menekan negara berkembang.

“Kita harus jelas, apakah benar tujuannya untuk mendukung konsep pembangunan berkelanjutan, atau hanya untuk perluasan akses pasar produk mereka,” kritik Sartono. (Ayu/BKSAP) foto: andri/parle/hr

Banyak Puskesmas dan RS Minim Fasilitas

Kritik terhadap layanan kesehatan terus disuarakan seiring berjalannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Setidaknya ada 336 rumah sakit (RS) tidak terakre-

ditasi dan tidak memiliki dokter spesialis. Bahkan, 17 persen puskesmas di Indonesia tidak memiliki akses listrik 24 jam.

Demikian terungkap dalam *Focus*

Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan F-PG DPR, Selasa (17/2). Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri, Fahmi Idris (Direktur BPJS Kesehatan), Hasbullah Thab-rany (*Center for Health Economics and Policy Studies, UI*), dan Asih Eka Putri (Anggota DJSN 2014-2019). Diskusi ini mengambil tajuk “Mewujudkan Indonesia Sehat Tanpa Sekat (Merumuskan Sistem Pembiayaan dan Pelayanan

Kesehatan Nasional).

Syamsul Bahri mengatakan, 60 persen puskesmas tidak memiliki ambulans dan bahkan tidak memiliki stetoskop. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan di tengah pemberlakuan JKN. Syamsul mengutip temuannya dari data dari Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes. Menurut data itu, ada 126 RSU pemerintah tidak memiliki dokter spesialis penyakit dalam, 139 RSU tidak memiliki spesialis bedah, 167 RSU tidak memiliki spesialis anak, dan 117 RSU tidak memiliki spesialis kandungan.

Bahkan, Syamsul juga mengutip data Kompas yang menyatakan 938 puskesmas di Tanah Air tidak memiliki tenaga medis. Sementara Asih Eka Pu-



Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bahri

tri dari Dewan Jaminan Sosial Nasional mengatakan, ketersediaan pelayanan kesehatan tidak merata standardisasi-

nya. Selama 2014, katanya, ada disintegrasi data pembiayaan dan pelayanan kesehatan. Ditambah lagi pemahaman masyarakat terhadap JKN sangat beragam. Ini adalah sebagian temuan selama BPJS Kesehatan beroperasi.

Kritik juga disampaikan Hasbullah Thabrani. Menurutnya, layanan kesehatan masih jauh api dari panggung. "Jauh layanan dari masyarakat. BPJS mikir duit, bukan layanan," tandasnya. Perlu revolusi mental dalam memberi layanan kesehatan kepada masyarakat. Belanja kesehatan dalam APBN juga dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Pemerintah perlu menaikkan anggaran kesehatan dua kali lipat lebih tinggi dari yang sudah ada. (mh) foto: zul/parle/hr

Aneh, Bentrok TNI-Polri Terjadi Lagi

Komisi III DPR menyikapi rangkaian kejadian pertikaian antara TNI-AL dengan Polri yang terus berulang, baik kejadian di Medan, kemudian di Batam dan beberapa waktu lalu di penjara Jawa Tengah. Kejadian terakhir adalah, di Bengkel Cafe Jakarta. Demikian dikatakan Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin, saat melakukan pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya, Selasa, (17/2) sore.

Untuk itu Azis Syamsuddin meminta kepada seluruh jajaran Polri, khususnya Kapolda Metro untuk mengantisipasi dan meredam situasi dan jangan emosi dalam menyelesaikan permasalahan ini agar tidak menyimpang dari hukum yang berlaku.

Harapan yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman, jangan sampai terjadi lagi benturan-benturan antara TNI dan Polri karena kejadian seperti ini sudah terjadi dimana-mana. Bahkan kata Benny, kejadian kali ini adalah di depan mata kita semua, di pusat pemerintahan, tepatnya di belakang Polda Metro Jaya.

Menurutnya, kejadian ini sangatlah aneh, apakah ini memang sengaja, atau memang di Bengkel Cafe ada kejahatan. "Jangan-jangan ada juga jual beli ganja kita tidak tahu," tukasnya.

Benny mengemukakan bahwa ada informasi yang tidak tuntas dan tidak jelas tentang kasus ini. Oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi III sangatlah penting untuk dibawa ke rapat gabungan antara Komisi III dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk mencari jalan penyelesaiannya.



Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin, Wakil Ketua Desmon J. Mahesa dan Kapolda Metro Jaya

Dia berharap, dalam menghimpun masukan jangan dibohongi dan hendaknya diberi tahu apa adanya dan apa sesungguhnya supaya terapinya juga jelas. Pasalnya, dia tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi di Bengkel Cafe tersebut, sementara Bengkel Cafe pun sampai sekarang tidak tahu ada dimana posisinya.

Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa menegaskan, mengingat fungsi pengawasan yang dimiliki DPR, dipandang perlu untuk melakukan kunjungan lapangan dalam rangka investigasi. Selanjutnya diharapkan dapat menghimpun berbagai data dan rekomendasi dalam meningkatkan kinerja Polri dan mejadi masukan penting dalam Rapat Kerja Gabungan nanti, khususnya dalam mencegah konflik serupa tidak terjadi dimasa yang akan datang. (Spy). foto: supriyanto/parle/hr

Perlunya Pendampingan Untuk Kawal Dana Desa

Diperlukan pendampingan dalam mengupayakan pengelolaan dana desa yang akuntabel, profesional, dan benar-benar dapat tepat sasaran, sehingga kemandirian desa dapat terwujud. Pasalnya, implementasi dana desa ini memiliki potensi penyalahgunaan yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi dan pengawasan.

Demikian disampaikan Plt. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,



Suasana Diskusi Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN

Suprayoga Hadi. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi dengan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, di Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara II, Selasa (17/02/15).

“Pendampingan itu dari masyarakat lokal atau setempat. Lamanya pendampingan tidak dapat ditentukan. Jika sudah memungkinkan, tidak perlu satu desa satu pendamping. Tapi bisa dipantau dari kecamatan,” kata Yoga.

Ia menambahkan, proses persiapan pendampingan desa akan dilakukan secara *prudent* dan profesional, untuk dapat menugaskan pendamping desa yang diperlukan oleh aparat desa dalam pengelolaan dana desa, serta oleh masyarakat desa dalam pemanfaatan dana desa secara produktif dalam rangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam APBN-P 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memperoleh persetujuan alokasi dana pendampingan Dana Desa sebesar Rp 1,4 Triliun yang akan digunakan untuk mengoptimalkan tenaga pendamping desa dari ex-fasilitator PNPM-MPD yang akan ditugaskan di tingkat Kecamatan.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Dana Alokasi Umum, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Kresnadi Prabowo Mukti menjelaskan, kepala desa harus

bisa menghabiskan dana desa sebesar kisaran Rp 1,4 miliar per tahun. Jika kepala desa tak mampu menghabiskan dana desa, maka akan mendapatkan sanksi administrasi berupa pemotongan jatah dana desa untuk tahun berikutnya.

“Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dana Desa secara tidak wajar, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA,” jelas Kresnadi.

Ditemui usai acara diskusi, Kepala Biro Analisa dan Pelaksanaan APBN Satyanto Priambodo mengungkapkan tujuan diadakannya diskusi adalah karena isu penting implementasi dana desa. Banyak pihak khawatir terhadap pemanfaatan yang digelontorkan Pemerintah sebesar Rp 20 triliun di tahun 2015 ini.

“Beberapa waktu lalu hal ini menjadi topic yang *trending* baik di dewan maupun di masyarakat. Kami sering mendapat kunjungan DPRD dari seluruh Indonesia yang menanyakan kekhawatiran para kepala desa atau perangkatnya dalam penggunaan dana desa dari pemerintah,” kata Nanang, panggilan akrab Satyanto.

Menurutnya, kekhawatiran ini harus disikapi oleh pemerintah dengan baik, melalui berbagai aturan yang disiapkan oleh pemerintah, baik itu dari Kementerian Desa maupun Kementerian Keuangan, sehingga dapat mendukung program Nawacita.

“Program Desa Membangun ini mempunyai banyak manfaat untuk pertumbuhan budaya dan ekonomi desa itu sendiri, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu target 2000 desa mandiri bisa tercapai. Sehingga tidak ada lagi pelarian tenaga kerja ke kota, dan masyarakat desa dapat membangun desanya dengan fasilitas yang ada,” harap Nanang.

Nanang berharap, diskusi ini dapat memberikan pemahaman baru kepada analis di Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, staf ahli, maupun peneliti di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. (sf,ss,hi)/foto:iwan armanias/parle/ iw.

Komisi V Dorong Bandara Soekarno-Hatta Tambah Run Way

Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan untuk mendesak PT. Angkasa Pura agar membangun Terminal IV, juga diikuti dengan pembangunan landasan pacu pesawat (*run way*). Hal ini untuk menampung peningkatan jumlah penerbangan yang relative sangat tinggi.

“Komisi V akan mendorong Kementerian Perhubungan supaya mendesak PT. Angkasa Pura agar bukan saja membangun terminal tetapi juga diikuti dengan pembangunan *run way* supaya menampung jumlah penerbangan yang relative sangat banyak,” ungkap Wakil



Tim Komisi V DPR saat meninjau PT. Angkasa Pura II

Ketua Komisi V Michael Wattimena dari Fraksi Partai Demokrat, saat mengun-

jungi Bandara Soekarno-Hatta. Selasa (17/2).

Menurut Michael Wattimena, ada persoalan yang sangat mendasar yaitu terkait dengan siklus *take off* dan *landing*, yang melayani rata-rata perhari 72 pesawat, dengan hanya mempergunakan 2 landasan yang ada, tidak akan menguntungkan bagi aspek keselamatan.

Selain itu, dua landasan yang ada sudah ada sejak 25 tahun yang lalu, dengan tingginya volume penerbangan akan mengganggu kekuatan landasan yang ada. Dengan pertumbuhan po-



tensi penerbangan yang ada, jika tidak ditambah *run way* akan menjadi kendala ke depan, mengganggu aspek keamanan, keselamatan, maupun kualitas penerbangan.

“Kami usulkan dengan dibangunnya terminal IV Bandara Soekarno-Hatta, harus juga diikuti dengan pembangu-

nan *run way* tambahan. Jika hal ini tidak segera diatasi maka dikhawatirkan akan terganggunya kekuatan *runway* yang ada,” ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan, PT.AP II mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 2 Triliun. Michael menginginkan dana tersebut juga dipergu-

nakan untuk membangun penambahan landasan pacu baru.

“Kami mengusulkan dengan PMN tersebut juga dipergunakan untuk pembangunan *run way* untuk melengkapai fasilitas bandara,” ungkap Michael Wattimena. (as) foto: rizka/parle/hr

DPR Masih Cari Format Badan Peradilan Khusus Sengketa Pilkada

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan Komisi II DPR masih mencari format Badan Peradilan Khusus yang menangani sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana yang diamanatkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Meski begitu, selama badan peradilan khusus itu belum terbentuk, sengketa pilkada tetap ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ke depan kita ingin bentuk badan serupa khusus untuk menangani sengketa Pilkada, atau Pemilu yang di situ nanti bisa saja merger dari semua yang ada. seperti DKPP, Bawaslu, PTTUN,” kata Ahmad Riza Patria dalam diskusi bertajuk ‘Revisi UU Pilkada dan Problematika Pemilu Serentak 2015’ di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/2).

Menurut politisi dari Partai Gerindra itu, salah satu yang dijadikan acuan badan peradilan khusus sengketa pilkada adalah peradilan khusus pajak yang menangani sengketa pajak. Selain masalah sengketa hasil, ada pula masalah kode etik, administrasi dan pidana dalam konteks pilkada.

Saat ini, kata Ahmad Riza Patria, semua kasus itu masih ditangani secara terpisah. Lembaga-lembaga seperti DKPP dan Bawaslu juga harus diperkuat. “Nanti akan kita cari format, apakah dimungkinkan digabung, atau dibagi dua. Prinsipnya kan kita ingin perkuat juga Bawaslu, DKPP,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya mengakui belum ada pula bayangan dari DPR apakah badan peradilan khusus itu akan diadakan di semua kabupaten/kota atau hanya di tingkat pusat. Ia menilai bahwa pembahasannya tidak urgent karena masih ada waktu sebelum tahun 2027 yaitu batas pilkada serentak nasional.

“Itu sebelum pilkada serentak nasional, tidak buru-buru. Kita lihat Pilkada serentak gelombang pertama ini, bagaimana keberhasilannya. Kita berikan kesempatan dulu MK menangani sengketa hasil pilkada serentak, nanti semua dievaluasi,” katanya.



Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria dalam acara Forum Legislasi

Di tempat yang sama, pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro merasa pesimis Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu menyelenggarakan pilkada serentak yang akan terlaksana di 272 daerah pada Desember 2015 ini. “Apa KPU siap? Saya tidak yakin. Kalau dipaksakan, ada risiko-risikonya. Ada yang dipaksakan. Idealnya Februari 2015 sudah go (persiapannya),” kata Siti Zuhro.

Siti Zuhro mengamati bahwa persoalan-persoalan di daerah sudah mulai muncul sejak sekarang. KPU harus mampu memetakan problem-problem dan mengantisipasi sejak sekarang. “Tahapan pilkada rentan konflik. Apa KPU dan KPU daerah siap? Secara mental dan teknis,” ujarnya.

Selain KPU, Siti Zuhro juga mengingatkan partai politik dan penegak hukum agar bersiap-siap. Parpol-parpol yang saat ini masih mengalami dualisme kepemimpinan juga diingatkan. “Masih tersisa dua partai yang masih bermasalah, apakah sudah final kah mereka berdua ini? Jangan kemudian pontang panting untuk kejar tayang,” katanya. (nt/sc) foto:zulfikar/parle/iw.

Nurhayati: Indonesia Tak Perlu Ragu Masuk OECD

Pemerintah Indonesia disarankan tak perlu ragu masuk *Organisation for Economic Co-operation and Development*(OECD) walau nanti

banyak tuntutan komitmen. Masuk organisasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan profil Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaff, Selasa (17/2), pada acara *Focus Discussion Group*(FDG) di DPR. OECD merupakan

organisasi internasional dengan 30 negara anggota yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. OECD berdiri tahun 1948 dengan nama *Organisation for European Economic Co-operation* (OEEC) yang dipimpin Robert Marjolin dari Perancis untuk membantu menjalankan Marshall Plan, untuk rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia II.

Keanggotaannya kemudian merambah ke negara-negara non-Eropa. Baru pada 1961, dibentuk kembali menjadi OECD oleh Konvensi tentang Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. Nurhayati sendiri menghimbau pemerintah tak perlu takut dengan ikatan komitmen dengan organisasi tersebut, karena banyak negara-negara lain juga yang mengabaikan komitmennya dengan alasan harus berkonsultasi dengan parlemen.

“Jadi maksud kami, tidak perlu segan-segan untuk masuk. Kita *high profile* saja. Anggota negara lain juga



Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaff

tidak menjalankan komitmennya. Kenapa Indonesia harus menjalankan komitmen. Kita harus belajar diplomasi seperti yang lain. Nah, kami melihat OECD ini bagus untuk profil kita. Kita kalah dengan Malaysia dalam hal profil,” ungkap Nurhayati.

Dikatakan Nurhayati, pemerintah Indonesia boleh saja mempertimbangkan keuntungannya masuk OECD.

Tapi, di sisi lain, Indonesia juga perlu merebut forum-forum internasional untuk memainkan diplomasi tingkat tinggi. “Kalau buat kami di DPR, kami selalu berebut forum dengan negara-negara tetangga. Ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ketika diplomasi parlemen ini tinggi, *high profil*, maka parlemen yang lain surut. Jadi di IPU itu, Malaysia enggak ada suaranya.”

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini, Arif Budimanta (staf khusus Menkeu), Toferu Sutikno (Direktur Pengembangan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kemlu), dan Saifullah (Kepala Bidang Perubahan Iklim/Plt Bidang Forum Multilateral, Kemenlu). Arif, misalnya, menjelaskan bahwa untuk menjadi anggota OECD daya saing Indonesia harus ditingkatkan, baik SDM, layanan publiknya, maupun infrastruktur. Rata-rata negara anggota OECD memiliki per kapita yang sangat tinggi, jauh di atas Indonesia.

(mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

PMN Utama Karya Jangan Sampai Bermasalah



Tim Komisi VI DPR saat meninjau pembangunan jalan Trans Sumatera

Upaya mewujudkan cita-cita besar jalan tol Trans Sumatera cukup rumit mulai dari perencanaan, pembahasan anggaran sampai disetujuinya pembiayaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Perusahaan BUMN Utama Karya yang ditugaskan menjalankan proyek ini diminta untuk menjaga komitmen.

“Pembahasan PMN sebesar Rp3,6 triliun melalui proses yang luar biasa, melelahkan. Kita berharap PT Utama Karya bisa menggunakan dana itu seefisien mungkin, sesuai perencanaan yang sudah disampaikan,” kata Wakil Ketua Komisi VI Farid Al Fauzi disela-sela peninjauan ke lo-

kasi pembangunan jalan Trans Sumatera ruas Medan-Binjai di Medan, Sumut, Senin (16/2/15).

Ia menambahkan publik sangat mengharapkan jalan ini bisa segera selesai dan memperlancar transportasi antara dua pulau besar Jawa dan Sumatera. Politisi Fraksi Partai Hanura ini menekankan selama proses pembangunan BPK dan DPR akan terus mengawasi.

“Semoga tidak ada persoalan dalam penggunaan PMN ini ke depan. Ini akan jadi percermatan BPK, diawasi DPR,” tandasnya.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi VI dari Fraksi PKS Tifatul Sembiring mengatakan pembangunan jalan Trans Sumatera akan menciptakan simpul-simpul ekonomi baru di wilayah ini.

Mantan Menkominfo yang menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut I berharap program ini perlu dikembangkan lebih jauh. “Infrastruktur ini akan menggerakkan ekonomi. Kita boleh bermimpi pada saatnya kita bisa menikmati naik kereta api dari Banda Aceh sampai ke Banyuwangi,” ujar dia.

Sementara itu dalam penjelasannya Direksi BUMN Utama Karya mengatakan anggaran PMN yang diterima akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada empat ruas berbeda. Rincian ruas tol yang dibangun adalah Medan-Binjai, Palembang-Simpang Indralaya, Pekanbaru-Dumai dan ruas Bakauheni-Terbanggi-Besar. (iky)

foto:ibnur/parle/hr



Komisi IX DPR Bahas Masalah TKI Di NTB



Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR saat pertemuan dengan Disnaker NTB dan jajarannya

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI yang sedang menjalankan fungsi pengawasan terkait kasus maraknya *human trafficking*, melakukan pertemuan dengan jajaran Disnaker Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepala BP3TKI Mataram, Kapolda NTB, Kanwil Imigrasi NTB, Kepala Dukupilsosnaker, Kepala BLK, Pimpinan APJATI, dan Perwakilan PPTKIS, Senin (16/2).

Kunjungan ini juga untuk mendapatkan gambaran dan data secara komprehensif terkait kondisi Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTKIS) dalam proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri serta memetakan permasalahan meningkatnya TKI *illegal* atau non prosedural di NTB.

Demikian salah satu maksud dan tujuan dilakukannya Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI seperti dikemukakan Ermalena dalam sambutannya selaku Ketua Tim Kunker Spesifik sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. Lebih lanjut, politisi perempuan dari PPP ini mengharapkan hasil kunjungan kerja spesifik ini akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

“Masukan dari berbagai pihak terkait pembenahan TKI akan menjadi bahan berharga dalam revisi Undang-undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI,” ungkap Ermalena.

Rombongan Tim Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI dipimpin Wakil Ketua Ermalena (PPP) didampingi para anggotanya, Ketut Sustiawan (PDI-P), Nursuhud (PDI-P), Susi Syahdona Bachsin (Gerindra), Zulfikar Achmad (PD), H.A Riski Sadig (PAN), Handayani (PKB), Chairul Anwar (PKS) dan Ali Mahir (Nasdem). (od) foto: naefuroji/parle/hr

Komisi III Pertanyakan Kejujuran Andi dan Tjahjo

Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub menilai pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak jujur. Politisi F-PAN ini menilai Tjahjo tidak bicara jujur terkait pertemuan dirinya dengan Ketua KPK Abraham Samad, hingga masuknya Samad sebagai nominasi calon Wakil Presiden dari PDI-Perjuangan.

Demikian terungkap ketika Komisi III memanggil Andi dan Tjahjo untuk mendengar keterangannya terkait pertemuan keduanya dengan Samad, sekaligus membahas pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyatakan Samad berniat menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi Presiden Joko Widodo.

Ayub juga memberikan sindiran keras kepada Tjahjo, yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, karena melontarkan pernyataan yang berubah-ubah soal pertemuan dengan Samad. Ia menegaskan, jangan ada keterangan yang ditutup-tutupi.

“Tidak jujur ini menyangkut masuknya Abraham Samad masuk nominasi, Pak Tjahjo dan Pak Andi. Sudah enam kali pertemuan soal calon wapres. Jangan ditutupi,” tegas Ayub di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Senin (16/02/15).

Politisi asal Dapil Aceh I ini juga menyindir Tjahjo yang sebelumnya mengaku tak pernah bertemu Samad, namun sekarang mengakui. Meskipun saat ini, Tjahjo mengatakan bertemu bukan empat mata, melainkan ada lima orang. Apalagi, Tjahjo mengetahui kalau bertemu dengan pimpinan KPK punya prosedur dan aturan agar tidak ada etika



Suasana RDPU Komisi III dengan Andi dan Tjahjo

yang dilanggar.

“Anda pernah membantah tidak bertemu dengan Samad. Anda bisa jelaskan saudara mengapa berubah tiba-tiba mengaku pertemuan ini. Ini yang Pak Tjahjo harus terangkan. Bertemu dengan pimpinan KPK melanggar kode etik atau tidak? Ini yang perlu saya garis bawah,” tegas Ayub.

Tjahjo mengatakan pertemuannya dengan Samad tidak membahas kemungkinan Samad menjadi cawapres mendampingi Presiden Jokowi. Ia mengatakan, pertemuannya dengan Samad merupakan hal yang wajar karena posisi-

nya saat itu adalah politisi PDI-Perjuangan, untuk membangun komunikasi. Pertemuannya juga bersifat formal.

Tjahjo menjelaskan dirinya hanya diajak oleh seorang dokter yang sangat dekat dengan Samad. Menurut dia apakah pertemuan itu melanggar SOP seorang pimpinan KPK, maka hanya Samad yang tahu. Pertemuan itu pun disaksikan David, Hasto, dan Supriyansyah serta tidak membahas capres atau cawapres.

“Pertemuan tidak empat mata, namun lima pasang mata yang berlangsung satu jam di apartemen SCBD. Saya lupa tanggalnya namun sekitar Maret-April. Soal salah atau tidak, melanggar SOP atau tidak, yang tahu ya Samad. Saya hanya diajak seorang dokter yang sangat dekat dengan Samad,” jelasnya.

Ayub juga mengkritisi pernyataan Andi yang dinilai tidak jujur soal bursa cawapres buat Jokowi. Seharusnya, sebagai Koordinator Tim Sebelas, Andi mesti bicara terbuka termasuk urusan Samad yang masuk nominasi menjadi cawapres. Malah, Andi menyatakan bahwa pertemuannya dengan Samad di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, adalah kebetulan adanya.

“Saat masuk ke ruang transit VVIP di Bandara Adi Sucipto sesuai kampanye Jokowi di Yogyakarta, kebetulan saya melihat rombongan Samad, dan saya meminta izin untuk bertemu dengan ibunda dan isteri beliau (Samad) untuk mencari data-data tambahan tentang nilai-nilai keluarga,

latar belakang dan hal-hal lain menyangkut latar belakang beliau sebelum menjabat sebagai Ketua KPK,” jelas Andi.

Pernyataan Andi ini pun dipertanyakan oleh Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman. Ia menilai ada kejanggalan, karena Samad tidak mempertanyakan maksud dan tujuan Andi mengunjungi keluarga Samad.

“Pertemuan di Bandara Adi Sucipto, apakah benar itu kebetulan apa memang diskenariokan? Memangnya Samad tidak menanyakan alasan Anda (Andi) ingin menemui isteri dan ibunya (Samad) di Pulo Mas? Kan aneh,” tanya Politisi F-PD ini.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi III Dwi Ria Latifah. Ia meminta Andi agar bersikap lebih jujur. “Apakah pertemuan serupa juga dilakukan ke keluarga tujuh calon lainnya. Lebih baik adinda (Andi) jujur saja, jangan berkelit. Kita di sini disaksikan oleh masyarakat, jangan menjadi dagelan yang menjadi bahan tertawaan,” tegas Politisi F-PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Supriyansyah, pemilik apartemen yang digunakan untuk menggelar pertemuan antara Samad dengan para petinggi PDI Perjuangan, mengaku bahwa memang apartemen itu sering dijadikan sebagai tempat pertemuan dengan para petinggi-petinggi PDI-Perjuangan. Bahkan, ia juga pernah diminta menjemput Puteri Indonesia 2014 Elfira Devinamira untuk bertemu dengan Samad. (sf,ss,ds,hi) foto: andri/parle/hr

Komisi IX Minta Masukan Terkait Revisi UU 39/2004



Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR saat pertemuan dengan Pemda Sumut

Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, serta kesehatan melakukan kunjungan lapangan ke Sumatera Utara dalam rangka mendapat masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR Pius Lustrilanang yang juga ketua dalam rombongan kunker spesifik, yang juga diikuti sejumlah anggota Komisi IX lainnya.

Pada pertemuan, Senin (16/2) dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Tim Komisi IX DPR diterima Asisten III Sekda Bidang Kesejahteraan Sosial Zulkarnaen.

Melalui kunker ini, Komisi IX DPR RI ingin mendapatkan penjelasan langsung mengenai izin operasional Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang

menetapkan keberangkatan TKI ke luar negeri di Medan, Sumatera Utara.

Pius mengatakan, banyak laporan yang disampaikan ke Komisi IX mengenai pelanggaran yang dilakukan PPTKIS. “Banyak yang tidak memiliki sarana dan prasarana penampungan TKI yang layak. Misalnya tempat tidur, kamar mandi yang tidak memadai, juga pemalsuan sertifikat pelatihan TKI, melakukan pemalsuan umur calon TKI, hasil rekam medis, dan kelengkapan dokumen diri lainnya,” kata Pius.

Pada pertemuan tersebut, juga dihadiri Dinas Tenaga Kerja Sumut, BP3TKI, Poldas Sumut, Imigrasi, Dukcapil, BLK Sumut, APJATI, dan PPTKIS Sumatera Utara.

Wakil rakyat yang berkunjung berjumlah 15 orang. Selain Pius juga didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri, diikuti Anggota Komisi IX DPR Dewi Asmara, Charles J Mesang dari Fraksi Partai Golkar, Siti Mufattahah, Ayub Khan, Vern Gladies Merry Inkiriwang dari Fraksi Partai Demokrat, Alex Indra Lukman, Elv Hartati dari PDI Perjuangan, dari Partai PKB Marwan Dasopang, Nihayatul Wafiroh, dan dari F-PKS Ansory Siregar. Sedangkan dari F-PAN M Ali Taher, dari F-PPP Muhammad Iqbal, dan dari Fraksi Partai Gerindra Robert Rouw.

Hasil kunjungan kerja spesifik ini akan dijadikan rekomendasi Komisi IX DPR RI, terutama Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI untuk melakukan penataan kembali terhadap sistem perlindungan dan penempatan TKI. (Andri) foto: andri/parle/hr

Bandara Ngurah Rai Minim Fasilitas UKM



Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR mamantau fasilitas dan pelayanan Bandara Ngurah Rai

Sentuhan desain arsitektur modern terlihat begitu megah menghiasi Bandar Udara Ngurah Rai, Bali. *Outlet-outlet* modern tampak lebih dominan ketimbang *outlet* para pelaku UKM. Hal ini sempat menjadi kritik Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR ke Bali.

Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR yang dipimpin Achmad Hafisz Tohir berkesempatan mamantau fasilitas dan pelayanan di Bandara Ngurah Rai, Sabtu (14/2). Tim kunker mendapat banyak penjelasan dari Direktur Bisnis Pengembangan dan Pemasaran PT. Angkasa Pura I Robert D. Waloni. *Outlet* UKM memang tersedia di bandara, walau menempati titik yang tidak luas.

Ruang tunggu keberangkatan dan kedatangan, baik domestik dan internasional tak luput dari pantauan Komisi VI. Agenda pemantauan ini terkait dengan program PMN kepada sejumlah BUMN. Dan PT Angkasa Pura termasuk yang menerima dana PMN untuk pengembangan bisnisnya.

“Untuk itu kita mengadakan kunjungan spesifik ke *airport* yang dikelola Angkasa Pura. Kita juga menerima aspirasi dari masyarakat Bali yang menyampaikan keluhan-keluhannya,” kata Hafisz.

Tim kunker spesifik Komisi VI yang ikut berkunjung ke Bali adalah Nyoman Damantra, Gde Sumarjaya Linggih, M. Hekal, Nurzahedi, Bambang Haryo Soekartono, Melani Suharli, Neng Eem Marhamah, M. Nasim Khan, Refrizal, dan Zulfan Lindan. Sebelumnya, tim kunker juga mengadakan pertemuan dengan, Utama Karya, Waskita Karya, PPPI, ASDP, dan Angkasa Pura I. (mh)/foto:husen/parle/hr

Komisi VII Janji Perjuangkan PLTS 1 MW di Bangli Jadi Aset Daerah

Ketua Tim Kunjungan Lapangan Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Bangli Satya W. Yudha berjanji akan memperjuangkan ke Kementerian Keuangan RI, agar aset Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkekuatan 1 MW di Kabupaten Bangli diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten.

Hal ini disampaikan Satya usai pertemuan Tim Komisi VII dengan Bupati Bangli, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Dirops PT. PLN (Persero) dan BPPT di Museum Gunung Api, Kabupaten Bangli, Bali, Kamis (13/2/2015).

Menurut Satya yang juga Wakil Ketua Komisi VII ini, sarana PLTS di Kabupaten Bangli merupakan proyek yang didanai pemerintah pusat dimana hingga saat ini belum dihibahkan ke pemerintah daerah.

Karena belum dihibahkan ke daerah, tandasnya, keberadaan PLTS yang berkekuatan 1 MW di Kabupaten Bangli yang sudah disambungkan ke PLN, dimana listriknya masuk dalam *gradenya* PLN belum bisa berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Karena aset yang dimiliki itu bukan merupakan aset daerah, Bupati Bangli titip agar Komisi VII memperjuangkan di Kementerian Keuangan agar PLTS berkekuatan 1 MW itu diserahkan kepada daerah,” kata Satya.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menyatakan bahwa



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR saat mengunjungi PLTS di Bangli

Kunjungan Lapangan Komisi VII ke Kabupaten Bangli sangat bermanfaat. Karena Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten yang dari sisi PADnya yang sangat termiskin di Indonesia.

“Namun saya sangat mengapresiasi Kabupaten Bangli ini mengembangkan Desa Mandiri Energi, dimana dalam Desa Mandiri Energi itu menggunakan upaya-upaya Energi Baru

dan Terbarukan,” ujarnya.

“Salah satunya, Kabupaten Bangli mengembangkan PLTS yang dikembangkan di daerah-daerah yang terpencil di beberapa desa yang tidak terlistriki sama sekali bahkan tidak tersentuh tangan PLN, ratio elektrifikasinya paling rendah dari seluruh kabupaten yang ada di Bali,” papar Satya.

Tujuan kunjungan Komisi VII DPR ke Kabupaten Bangli, mantap Satya, diharapkan dapat memfasilitasi Kabupaten Bangli untuk menyukseskan Program Listrik Masuk Desa yang dijalankan oleh PLN.

Selanjutnya Satya menginformasikan, bahwa dalam kunjungan ini juga Komisi VII melihat Kementerian Ristek yang kebetulan salah satu LPNKnya adalah BPPT, turut mengembangkan Kabupaten Bangli ini dari sisi penggunaan e-government atau melakukan pendampingan-pendampingan dan sistem inovasi nasional.

“BPPT sudah bekerja sama dengan Kabupaten Bangli, dan Bupati Bangli sangat menghargai bantuan atau pendampingan dari BPPT,” terangnya. (sc)/foto:suci/parle/iw.

Komisi VI Minta Angkasa Pura II Tuntaskan Temuan BPK



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR saat mengunjungi Bandara Kuala Namu, Medan

Komisi VI DPR RI meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Angkasa Pura II segera menyelesaikan sejumlah permasalahan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keseriusan perusahaan yang bergerak di bidang kebandaraan ini akan menjadi syarat utama bagi pencairan anggaran PMN (Penyertaan Modal Negara).

“Laporan dari BPK ada sebelas temuan signifikan yang belum selesai ditindaklanjuti PT Angkasa Pura dalam periode 2009-2014. Ini tidak tuntas, PMN tidak akan dikucurkan,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI Heri Gunawan dalam rapat dengan jajaran manajemen PT. Angkasa Pura di

Medan, Sumut, Minggu (15/2/15).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyebut kunjungan spesifik komisi VI masa persidangan II 2014-2015 adalah kewajiban konstitusional DPR dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan mengawal kebijakan pemerintah khususnya terkait BUMN.

Ia mengingatkan rapat kerja dengan Menteri BUMN beberapa waktu lalu, Komisi VI DPR telah menyetujui sebagian usulan PMN dalam RAPBNP 2015 namun dengan sejumlah catatan terutama menyelesaikan sejumlah temuan BPK.

“Khusus untuk Bandara Kuala Namu ini DPR memperoleh laporan dari BPK ada 25 temuan pada pembangunan tahap I dan II, kerugian negara diduga Rp123 miliar. Sejauh mana Angkasa Pura telah menyelesaikan hal ini?” tambahnya.

Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Agussalam menjelaskan sampai saat ini telah berupaya menyelesaikan pekerjaan rumah yang telah diberikan BPK. Menurutnya beberapa temuan sebenarnya tidak merugikan negara tetapi hanya masalah pendekatan audit yang berbeda.

“Kepada Komisi VI kami sampaikan, kita komitmen untuk menyelesaikan temuan BPK ini dalam waktu yang tidak terlalu lama,” paparnya. Terkait PMN sebesar Rp2 triliun diproyeksikan terutama menuntaskan perluasan Bandara Soekarno Hatta yang saat ini sudah melayani 60 juta penumpang/tahun padahal kapasitasnya hanya 22juta/tahun.

(iky)/foto:ical/parle/hr.

DPR Setujui APBN-P 2015 Kemenristekdikti

Komisi X menyetujui usulan pagu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp 44,770 triliun. Anggaran itu akan dibagi ke tiga program besar di lingkungan Kemenristekdikti.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya mendapat anggaran sebesar Rp 159 miliar. Kemu-

dian program peningkatan kemampuan Iptek untuk penguatan sistem inovasi nasional sebesar 702 miliar. Dan Rp 43,907 triliun untuk program Pendidikan Tinggi.

Demikian kesimpulan rapat kerja Komisi X dengan Menristek Mohamad Nasir. Rapat dipimpin Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Kamis

(12/02/15).

“Terkait dengan tambahan belanja hasil pembahasan RAPBN-P 2015 sebesar Rp 1,2 triliun, Komisi X dan Menristekdikti sepakat akan dialokasikan ke penambahan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) kepada 71 ribu mahasiswa sebesar Rp 298 miliar. Kemudian, untuk lanjutan sarana dan prasana Perguruan Tinggi Negeri sebe-

sar Rp 901 miliar,” jelas Riefky.

Sementara, untuk kekurangan beasiswa PPA sebanyak 34 ribu mahasiswa yang belum dipenuhi, akan dialokasikan dari realokasi penghematan anggaran APBN tahun 2015.

Dalam APBN 2015, Kemenristekdikti juga mengusulkan realokasi penghematan perjalanan dinas sebesar Rp 355 miliar. Hasil penghematan itu akan dialokasikan ke penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran satuan kerja Ditjen Pendidikan Tinggi sebesar Rp 59 miliar.

Kemudian, Rp 123 miliar untuk kegiatan kemahasiswaan dan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN), kegiatan prioritas Tri Dharma Perguruan Tinggi sebesar Rp 158 miliar, dan Rp 13 miliar untuk kegiatan prioritas PHLN dan RMP. (sf), foto : naefurodjie/parle/hr.



Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya

DPR Harapkan Pemerintah Tingkatkan Perolehan Emas

DPR berharap Pemerintah dapat meningkatkan perolehan emas dalam pertandingan olahraga tingkat internasional. Pasalnya, anggaran yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Di APBN-P, digelontorkan anggaran Program Indonesia Emas (PRIMA) sebesar Rp 395 miliar.

Itulah yang menjadi salah satu sorotan dari beberapa Anggota Komisi X saat rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, ketika pembahasan RAPBN-P 2015, di Gedung Nusantara I, Kamis (12/02/15).

“Anggaran PRIMA cukup besar, tapi target yang didapatkan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dana ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, walaupun belum mencapai dana yang kita harapkan. Mungkin nanti pada pembahasan APBN 2016, kita akan lebih fokus lagi, dimana kemungkinan dukungan kita tingkatkan, namun di satu sisi, pendampingan dari Kemenpora juga harus dioptimalkan,” kata Riefky.

Politisi F-Demokrat ini menambahkan, walaupun anggaran PRIMA cukup besar, namun atlet merasa belum optimal dan efektif dalam implementasinya. Tentunya ini menjadi catatan, agar dana PRIMA ini dalam hal implementasi turunnya dana ini harus sesuai dengan kebutuhan, terutama dalam mendukung atlet menggapai prestasi internasional.

“Yang selama ini dikeluhkan, seperti lambatnya dana turun, jumlah dana, kemudian dukungan kepada cabang olahraga, dan medali yang menjadi target, itu harus dievaluasi. Kemudian diutamakan kepada apa yang telah menjadi prioritas kita dalam mendapatkan medali itu,” tambah Politisi asal Dapil Aceh I ini.

Riefky juga meminta Kemenpora dan KONI, untuk terus memantau, mengevaluasi, mendampingi, dan membimbing Pengurus Besar, yang notabene merupakan tempat ber-



Ketua Komisi X DPR berjabat tangan dengan Menpora

naungnya para atlet. Sehingga, PB tetap membina atletnya dengan baik.

“Banyak cabang olahraga di era tahun 80-90an memiliki prestasi bagus, tapi kali ini, prestasinya agak menurun dibanding beberapa dekade yang lalu. Tentu kita mendengar atlet sampai pindah kewarganegaraan di negara lain, karena kurang diperhatikan kesejahteraannya, ini kita perlu evaluasi. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tutup Riefky.

Sementara itu, Anggota Komisi X Junico BP Siahaan menilai implementasi program PRIMA masih belum jelas. Ia menilai, tidak ada capaian keberhasilan program ini untuk kita evaluasi.

“Anggarannya besar sekali. Kalau kita lihat, satlak prima tidak jelas dan tidak spesifik. Anggaran itu tidak didetailkan akan bergerak ke atlet yang mana? Kita jangan menebar anggaran ke cabang olahraga yang kita rasa sulit mendapatkan emas,” kata Politisi F-PDI Perjuangan ini.

Untuk itu, tambah Politisi yang akrab dipanggil Nico ini, pihaknya meminta agar program ini dikaji ulang. Apalagi, hasil temuannya di lapangan maupun dapil, banyak atlet yang mengeluhkan program PRIMA ini.

“Targetnya tinggi, anggarannya besar, tapi kita lihat, emas yang didapat berapa? Bagi saja anggaran itu dengan jumlah kontingen dan perolehan emasnya. Koefisiennya bagus tidak? Jadi bukan semata hanya mengirimkan banyak kontingen saja, tapi bagaimana target yang didapat,” tambah Politisi asal Dapil Jawa Barat I ini.

Ia juga meminta kepada Menpora agar hati-hati dalam mengelola anggarannya. Mengingat, bidang olahraga meru-

pakan bidang yang mudah dinilai publik, yaitu perolehan emasnya.

“Prestasi olahraga itu paling mudah terukur, lewat perolehan emas. Jadi sayang jika anggaran sebesar ini tapi salah sasaran. Menteri harus lebih hati-hati, karena standarnya jelas,” tutup Nico.

Dalam kesempatan itu, Komisi X dan Menpora menyetujui usulan pagu anggaran RAPBN-P tahun 2015 untuk Kemenpora sebesar Rp 3,304 triliun, dengan rincian ke empat program besar. Yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya sebesar Rp 256 miliar, dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenpora sebesar Rp 69 miliar.

Sementara, untuk program kepemudaan dan keolahragaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,346 triliun, dan program pembinaan olahraga prestasi sebesar Rp 1,361 triliun. (sf)/foto:andri/parle/hr

PIA DPR Gelar Talk Show

Ketua PIA (Persaudaraan Istri Anggota) DPR RI, Deisti A Novanto berharap anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang bahagia, cerdas dan mampu menjadi tumpuan masa depan sesuai dengan cita-cita orang tua semua. Hal tersebut diungkapkannya di depan anggota PIA dalam acara *talk show parenting* bertema “Anakku Sahabatku” yang diadakan di Gedung Pustakaloka, Kamis (12/2).

“Acara ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para istri anggota dan segenap undangan yang hadir akan pentingnya menjaga dan menjadikan anak sebagai sahabat. Karena sebagaimana diketahui bersama, anak adalah generasi penerus keluarga dan bangsa. Di tangan-nyalah terletak masa depan negeri ini,” papar Deisti.

Dalam acara tersebut turut hadir Cahyadi Takariawan sebagai pembicara yang memberikan kiat-kiat tentang bagaimana cara membangun keluarga harmonis, serta menciptakan anak-anak yang berkualitas. “Kunci sukses bagi bunda untuk bisa menjadi sahabat anak adalah dengan terlebih dahulu menjadi sahabat bagi pasangan,” ungkap Cahyadi.

Sementara itu Wakil Ketua PIA, Grace Fadli Zon menyarankan kepada panitia agar ke depan juga menghadirkan para suami yang tak lain adalah anggota DPR RI. Hal tersebut dikatakan Grace, begitu ia biasa disapa, agar para



Ketua PIA DPR RI Deisti A Novanto

suami juga dapat mengerti perannya sebagai seorang ayah termasuk juga memahami peran istri yang bersama-sama ikut terlibat dalam perkembangan sang anak. (Ayu, ds, ss)/foto:rizka/parle/iw.



Anggota Komisi IV DPR Ono Surono

MENTERI SUSI DIMINTA PERHATIKAN HARGA SOLAR NELAYAN

Anggota Komisi IV DPR Ono Surono dari Fraksi PDI-Perjuangan menyoroti perbedaan harga solar yang dijual Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan

SPBN, dengan Stasiun bahan Bakar Bunker (SPBB).

Ono Surono mengungkapkan hal itu dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan



Susi Pudjiastuti, bahwa harga solar di SPBB Rp7.600 dan kalau di SPBN dan SPDN sesuai surat edaran Pertamina harganya Rp8.550. Dia meminta agar harga solar di tempat-tempat tersebut diseragamkan.

Dia mendesak Menteri menelusuri

harga BBM non subsidi yang disalurkan SPBN, SPBN, dan SPBB. Dia melihat ada perbedaan harga, di bunker lebih murah dibandingkan harga jual di SPBN dan SPDN, ada selisih Rp1.000.

“Karena nelayan di lapangan bertanya-tanya harga yang benar yang

mana? Sehingga saya mohon Ibu Menteri minta Kementerian ESDM ke Pertamina, harganya sama di seluruh Indonesia dan tidak membedakan harga di SPBB, SPDN dan SPBN,” tegasnya. (as), foto : riska/parle/hr.

Ketua BKSAP Dapat Apresiasi di PBB

Pembangunan global dan agenda pembangunan pasca-2015 tak pernah lepas dari peran parlemen di seluruh dunia, termasuk DPR RI. Konsep *Millenium Development Goals* (MDGs) yang disampaikan Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaff mendapat apresiasi di PBB. Demokrasi dan kemauan politik sangat strategis menunjang capaian MDGs.

Nurhayati menegaskan, parlemen punya peran strategis di setiap negara dalam program MDGs. Dari parlemenlah aturan main berupa UU yang menyangkut pembangunan dirumuskan. Parlemen berkepentingan menyusun legislasi, anggaran, dan evaluasi undang-undang yang terkait dengan agenda pembangunan global.

Nurhayati memaparkan konsepnya sebagai panelis dalam pertemuan *High Level Thematic Debate on Means of Implementation for a Transformative Post-2015 Development Agenda* yang diadakan oleh Majelis Umum



Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaff

PBB pada 9-10 Februari lalu di New York, Amerika Serikat. Acara ini mengundang negara-negara anggota untuk mendiskusikan isu-isu kritis. Dari parlemen dunia, hanya Indonesia dan Mexico yang diundang. Acara dibuka oleh Presiden Majelis Umum PBB, Sam Kutesa dari Uganda.

Nurhayati sendiri mengajukan tema “Peran Parlemen dalam Implementasi

Agenda Pembangunan Pasca-2015” dalam pertemuan terhormat tersebut. Ia disambut meriah oleh semua peserta, karena konsepnya sangat realistis dan memiliki bobot kontribusi yang nyata bagi forum tersebut. Salah satu yang direkomendasikan Nurhayati adalah perlunya parlemen internasional merumuskan agenda pembangunan pasca-2015 dengan perwakilan eksekutif semua negara anggota PBB.

Sementara itu, sebagai Presiden Majelis Umum PBB, Sam Kutesa menyampaikan, pentingnya mobilisasi sumber daya domestik, memastikan dana bantuan pembangunan resmi yang akuntabel, serta pemanfaatan dan keterlibatan sektor swasta dan perdagangan. Hasil pertemuan ini akan menjadi masukan bagi negosiasi antar pemerintah pada agenda pasca-2015 dan konferensi internasional tentang pembiayaan pembangunan yang ketiga. (mh, BKSAP) foto: iwan armanias/parle/hr

Teror Penyidik KPK, Sikap Presiden Menentukan

Anggota Komisi III DPR RI Wenny Haryanto menilai sikap presiden sangat menentukan agar sejumlah persoalan - termasuk teror bagi penyidik KPK bisa segera reda. Negara, menurutnya harus memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, apalagi aparat penegak hukum.

“Penting bagi presiden selaku pemimpin tertinggi dan penanggung jawab keamanan untuk memberikan jaminan rasa aman kepada siapa pun yang bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepada aparat penegak hukum,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/2/15).

Bagi politisi dari Fraksi Partai Golkar ini akar persoalan dari teror terhadap penyidik KPK ini adalah berlarut-larutnya masalah pelantikan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Ini kemudian diikuti dinamika penetapan tersangka Budi Gunawan dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III dari F-PDI Perjuangan Risa Mariska menekankan kondisi saat ini merupakan ujian bagi kredibilitas KPK. Ia kemudian mempertanyakan langkah pimpinan KPK yang melaporkan teror kepada Presiden bukan kepada kepolisian.



Anggota Komisi III DPR Wenny Haryanto

“Kita tahu Presiden Joko Widodo sudah memberikan atensi dan meminta pelaku teror ditangkap. Tapi kalau KPK tidak berkoordinasi dengan kepolisian bagaimana penerornya bisa ditangkap,” tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar Barat VI ini. (iky) foto: iwan armanias/parle/hr

DPR Temukan Kesimpangsiuran Kasus Tanah di Medan



Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J. Mahesa berdialog dengan Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Wakil Ketua Komisi III DPR yang sekaligus memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Sumut Desmon Junaidi Mahesa mengatakan, ada kesimpangsiuran antara penegak hukum di Sumatera Utara, terkait penetapan status tersangka Mantan Kepala Kantor Pertanahan atau BPN Kota Medan Dwi Purnama dan Kepala Seksi Pemberian Hak pada Kantor Pertanahan Kota Medan Hafizunyah kian janggal.

Hal ini dikemukakan pada saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Medan, dan melakukan peninjauan langsung ke Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan Rabu (11/2) siang. Selain itu masih adanya persoalan lainnya seperti penetapan masalah kasus Centre Poin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang masih menunggu sertifikasinya.

“Kepolisian dan Kejaksaan harus hati-hati dalam mengambil sikap dalam menangani kasus tersebut. Masa sudah disinggung oleh Kepala Pengadilan tidak mengerti juga, dan jangan dicari-cari dengan persoalan yang lain,” tegas Desmon.

Lebih lanjut Desmon menyebutkan mantan Kepala BPN Kota Medan, Sumatera Utara saat itu, hanya menjalankan perintah administratif saja. Disisi lain, sikap itu juga tidak terlepas dari sikap Kepala Kantor BPN, sehingga memunculkan persoalan hukum.

Sementara Anggota Komisi III DPR Jumimart Girsang menambahkan, bahwa alasan Polda Sumut menetapkan tersangka karena kedua pejabat tersebut menerbitkan surat yang bukan wewenang keduanya.

“Bukan sebatas keterangan Polda saja. Alasan itu disampaikan ke Komisi III DPR secara tertulis. Namun saya tidak tahu surat apa yang diterbitkan itu, sehingga keduanya dijadikan tersangka. Kalau untuk pasal yang dijeratkan oleh Polda antara pasal 241 dan 240,” ungkap Junimart.

Anggota Komisi III DPR Junimart meminta kepada pihak berwajib yang menangani kasus itu, memeriksa saksi ahli dan orang berkepentingan atas kasus itu. “Dengan cara ini dapat menciptakan rasa keadilan ditengah masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya kasus itu sudah selesai namun masih ada tersangka. “Ini sangat aneh dalam penegakkan keadilan,” paparnya.

Sementara Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Eko Hadisutedjo mengatakan, kasus itu masih dalam proses, Begitu juga dengan surat perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus itu, lanjut, Jenderal Polisi dengan Pangkat dua Bintang Kepolisian belum pernah menerbitkan surat SP3. “Pihak Kepolisian optimis untuk menuntaskan kasus itu,” jelasnya. (Spy)/foto:supriyanto/parle/hr.

Putusan Presiden Diharapkan Redam Kisruh KPK-Polri



Anggota Komisi III DPR RI John Kenedy Azis

Anggota Komisi III DPR RI John Kenedy Azis menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Baginya kebijakan tersebut diharapkan dapat meredam kekisruhan yang terjadi diantara dua institusi Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Apa yang disampaikan oleh Presiden kita harap dapat meredam kondisi yang terlanjur memanas, mudah-mudahan hal ini dapat mengakhiri kekisruhan Polri dan KPK yang sudah berlangsung satu bulan ini,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (18/2/15).

Politisi Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Sumbar II ini mengingatkan tugas berat pimpinan Polri dan KPK selanjutnya cukup berat, membangun harmoni dan mem-

bawa kinerja kedua institusi tersebut lebih baik.

Bicara pada kesempatan berbeda Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan mengatakan masih menunggu surat resmi dari Presiden Jokowi sebelum menetapkan sikap resmi. Baginya masih terlalu dini untuk menyatakan sikap karena DPR sudah memasuki masa reses.

“Kita tunggu saja surat dari Presiden baru DPR bersikap. Berdasarkan UU kita diberi waktu 20 hari pada masa sidang

aktif untuk menetapkan keputusan, jadi kita bahas ini dalam rapat internal setelah DPR selesai reses,” ungkap dia.

Namun selaku partai pengusung Fraksi PDIP menurutnya menyampaikan rasa kecewa karena kandidat yang dijagokan Komjen Pol. Budi Gunawan batal dilantik. Sementara dalam penjelasannya Presiden Jokowi menjelaskan langkah membatalkan pelantikan untuk meredakan perbedaan yang muncul ditengah masyarakat. (iky) foto: andri/parle/hr

DPR Dukung Pembangunan Tol Palindra

Komisi VI DPR RI sangat mendukung realisasi pembangunan tol Palembang-Indralaya (Palindra) di Sumatera Selatan. Ini merupakan pembangunan infrastruktur prioritas sejak setahun lalu. Tol Palindra membutuhkan dana lebih kecil daripada tiga proyek tol trans Sumatera lainnya.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin, Senin (16/2), saat memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi VI ke Sumsel. “Pembangunan jalan tol ini sudah menjadi prioritas sejak tahun lalu untuk segera dibangun. Dari studi yang dilakukan, tol Palindra paling layak dan tidak ada alasan untuk menunda,” katanya. usai pertemuan dengan Gubernur Sumsel Alex Noerdin di Kantor Gubernur.

Menurut Dodi, selain proyek Palindra, masih ada tiga proyek tol lainnya yaitu tol trans Sumatra yang meliputi, Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, dan Pekanbaru-Dumai. Tol Palindra sendiri sudah menyelesaikan pembebasan lahan pada akhir Februari lalu. Tol ini dibangun karena tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi dan sering terjadi kecelakaan dengan korban jiwa. Diharapkan, paling lambat akhir April pembangunan konstruksi bisa dimulai.

Hal senada disampaikan pula oleh Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir. Katanya, rencana pembangunan tol Palindra sudah diklarifikasi oleh Gubernur Sumsel dan dilakukan pengerjaannya oleh PT Hutama Karya. “Ini menjadi pil penguat untuk menyegerakan, pembangunan tol tersebut,” ujarnya. Dukungan DPR ini, kata Hafisz, termasuk persetujuan suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN)



Ketua Tim Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin (kanan) didampingi Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir beserta tim dalam rangkaian kunjungan di Sumsel

sebesar Rp 3,5 triliun kepada Hutama Karya.

“Jadi pembangunan Tol Palindra paling siap. Tidak ada alasan untuk menunda,” kata politisi PAN ini. Sementara itu Anggota Komisi VI lainnya dari F-PG Lili Asjudiredja juga mendesak agar pembangunan jalan tol Palindra segera diwujudkan. Dikatakannya, di jalur ini sering terjadi kemacetan, sehingga pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas.

Pembangunan infrastruktur jalan ini sangat urgen untuk mendukung mobilitas sumber daya alam yang sangat kaya di Sumsel. Seperti diketahui, Sumsel memiliki kekayaan batubara, kelapa sawit, gas alam, dan komoditas

lainnya. Bahkan, selain tol, Lili juga mendukung dibangun jalur ganda (*double track*) kereta api Palembang-Bakauheni.

Sementara Dodi menambahkan, tol di Pulau Jawa beda dengan tol di Pulau Sumatera. Struktur dan kepadatan tanah di Sumatera agak lembek. Keikutsertaan pihak swasta pun dalam proyek ini sangat minim. Pembangunan tol tersebut perlu penugasan langsung dari pemerintah. Ia optimis jika pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi, maka upaya membangun trans Sumatera *high way* akan segera terwujud. (mp), foto : mastur prantono/parle/hr.



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah menerima Ketua Hanns-Seidel Foundation, Ursula Mannle, Senin (16/02)
Foto: Iwan Armanias/Parle/HR



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto menerima Duta Besar Qatar Mohaamed Khater-Al Khater, Senin (16/02)
Foto: Iwan Armanias/Parle/HR



Panja Komisi V DPR RI dipimpin Ketua Komisi Fary Djemy Francis meninjau berbagai fasilitas Bandara Soetta (kiri) dan bersilaturahmi dengan mantan Presiden BJ Habibie himpun masukan RUU Keselamatan Penerbangan (kanan), (17-18/02) Foto: Rizka/Parle/HR



Tim Kunjuran Spesifik Komisi VI DPR RI dipimpin Azam Azman meninjau PT. Pertani (Persero) Mojokerto Jatim, Senin (16/02)
Foto: Sugeng/Parle



Tim Kunjuran Spesifik Komisi VI DPR RI dipimpin Heri Gunawan melihat pengembangan Pelabuhan Belawan, Sumut oleh PT. Pelindo, Foto: Ibnur Khalid/Parle